

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN ATAS
PERNYATAAN GUBERNUR SUMUT TENTANG
PERGANTIAN PLAT BL MENJADI BK/BB**

TUGAS AKHIR

Oleh:

RAHMAD ABDILLAH HAQ
2203110368

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi khusus Hubungan Masyarakat**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : RAHMAD ABDILLAH HAQ
NPM : 2203110368
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Pada Hari, tanggal : RABU, 11 FEBRUARI 2026
Waktu : Pukul 13:00 s/d Selesai

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom. (.....)
PENGUJI II : Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP. (.....)
PENGUJI III : Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom. (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.
NIDN:0030017402




Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.
NIDN:0111117804

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Rahmad Abdillah Haq**, NPM 2203110368, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Februari 2026.

Yang Menyatakan,



Rahmad Abdillah Haq

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : RAHMAD ABDILLAH HAQ
NPM : 2203110368
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Judul Tugas Akhir : PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN
ATAS PERNYATAAN GUBERNUR SUMUT
TENTANG PERGANTIAN PLAT BL
MENJADI BK/BB

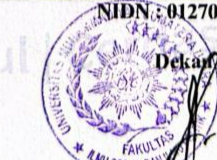
Medan, 29 Januari 2026

Pembimbing

Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 0112118802

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 0127048401



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.SP.
NIDN : 0030017402



Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta kekuatan kepada penulis sehingga penyusunan Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Kota Medan atas Pernyataan Gubernur Sumatera Utara tentang Pergantian Plat BL Menjadi BK/BB” dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, tentu proses penyusunan Skripsi ini tidak akan dapat penulis tuntaskan dengan lancar dan terarah. Skripsi ini merupakan bagian dari rangkaian proses akademik yang harus ditempuh dalam upaya memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis berharap penyusunan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam memberikan kontribusi ilmiah melalui kajian komunikasi publik, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang tersayang Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda Aflina Suryanita Lbs, yang selalu menjadi sumber kekuatan utama dalam kehidupan penulis. Doa, nasihat, ketulusan, serta kasih sayang yang diberikan menjadi pendorong terbesar dalam menjalani proses pendidikan hingga pada tahap penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan dan dukungan tanpa pamrih yang diberikan selama ini.

Penyusunan Skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya membutuhkan pemahaman akademik, tetapi juga ketekunan, kesabaran, serta komitmen untuk menggali persoalan secara mendalam. Dimulai dari proses memahami teori-teori komunikasi, menelusuri literatur terkait, melakukan analisis terhadap isu kebijakan publik, hingga menyusun desain penelitian yang tepat agar mampu menggambarkan realitas sosial secara objektif. Seluruh rangkaian proses ini dapat dilakukan dengan baik berkat arahan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah menciptakan iklim akademik yang kondusif serta menyediakan fasilitas pendidikan yang mendukung selama penulis menempuh perkuliahan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas perhatian serta kebijakan akademik yang sangat membantu mahasiswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kemahasiswaan dan akademik.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas arahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa selama menjalani proses pendidikan.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom., selaku Wakil

Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan bimbingan serta informasi akademik selama penulis menempuh perkuliahan.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas peran serta bimbingannya dalam bidang kemahasiswaan yang mendukung perkembangan akademik dan non-akademik peneliti.
6. Bapak Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan pengarahan serta dukungan akademik selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan hingga memasuki tahap penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah membantu penulis melalui berbagai proses administrasi akademik serta memberikan informasi yang sangat dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta dukungan akademik yang sangat berarti sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah beliau berikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali peneliti dengan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademik yang menjadi dasar penting

dalam penyusunan penelitian ini.

10. Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu proses administrasi, pemberkasan, serta memberikan informasi penting yang memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terdekat penulis Fatin Nadya, Zikri Al Fikri, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, serta membantu penulis melewati berbagai proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan ruang diskusi, bantuan teknis, maupun sekadar menjadi tempat berbagi cerita dan motivasi. Semoga kebersamaan dan silaturahmi yang terjalin dapat terus bertahan dan menjadi kenangan berharga dalam perjalanan pendidikan penulis.
12. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat terbaik Amanda Mayasari yang selalu menemani penulis dalam proses panjang perjalanan akademik ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, tawa, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Di tengah kesibukan dan tekanan tugas akademik, sahabat terbaik penulis selalu hadir sebagai sumber motivasi dan energi positif yang sangat berarti.
13. Penulis juga menghaturkan apresiasi kepada diri sendiri **Rahmad Abdillah Haq** atas keteguhan, usaha, dan konsistensi yang telah dilakukan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Berbagai tantangan dan tekanan akademik dapat dilalui dengan kesabaran dan komitmen yang kuat. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan

memiliki nilai berharga bagi perkembangan diri.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini pada tahap berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Medan, 29 Januari 2026

**Rahmad Abdillah Haq
2203110368**

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN ATAS PERNYATAAN GUBERNUR SUMUT TENTANG PERGANTIAN PLAT BL MENJADI BK/BB

OLEH:
RAHMAD ABDILLAH HAQ
2203110368

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kota Medan memaknai pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait wacana pergantian plat kendaraan BL menjadi BK/BB serta faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbentuk melalui kombinasi pemahaman administratif, pengalaman sosial, serta intensitas paparan informasi dari media massa dan media sosial. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah penataan administrasi kendaraan dan peningkatan pendapatan pajak daerah, sementara kelompok lainnya memandang pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan akibat minimnya sosialisasi dan kejelasan informasi resmi. Media massa, khususnya media sosial, memiliki peran signifikan dalam membangun opini publik melalui perbedaan framing pemberitaan, yang pada akhirnya memperkuat keragaman persepsi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami menjadi elemen krusial dalam membentuk pemahaman publik serta memengaruhi citra dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Komunikasi Pemerintah, Media Massa, Kebijakan Publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Persepsi	8
2.2 Komunikasi Pemerintah	11
2.3 Media Massa dan Pembentukan Persepsi	13
2.4 Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik.....	16
2.5 Anggapan Dasar.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Definisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5 Informan atau Narasumber.....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
4.2 Identitas Narasumber	27
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	29
4.3.1 Pemahaman Masyarakat	31

4.3.2 Peran Media Massa dan Pembentukan Persepsi	38
4.3.3 Komunikasi Pemerintah	46
4.3.4 Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik.....	50
4.4. Pembahasan.....	56
4.4.1 Pemahaman Masyarakat	57
4.4.2 Peran Media Massa dan Pembentukan Persepsi	58
4.4.3 Komunikasi Pemerintah	59
4.4.4 Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik.....	61
BAB V PENUTUP	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	21
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian	24
Gambar 4.4 Informan Joni Ahmad	26
Gambar 4.5 Informan Dedi Renaldi.....	27
Gambar 4.6 Informan Herry Andhika.....	28
Gambar 4.6 Informan Lasda Meria.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu mengenai kebijakan plat kendaraan di Sumatera Utara menjadi perbincangan luas setelah pernyataan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang meminta agar kendaraan berpelat BL khususnya yang beroperasi dan berdomisili di wilayah Sumut untuk mengganti platnya menjadi BK atau BB. Ucapan tersebut muncul setelah viralnya kejadian penyetopan truk berpelat BL di jalan lintas Sumut, yang kemudian memicu beragam tanggapan publik di media sosial maupun media daring. Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat. Sebagian pihak menilai hal itu sebagai larangan bagi kendaraan berpelat BL untuk memasuki Sumatera Utara, sementara pihak lain memahami bahwa kebijakan tersebut hanya dimaksudkan untuk kendaraan operasional yang berdomisili di provinsi tersebut. Gubernur Sumut kemudian memberikan klarifikasi bahwa imbauan itu bertujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dari sisi administrasi, kebijakan mengenai pelat nomor kendaraan memiliki (PKB), yang merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi berkepentingan agar setiap kendaraan yang beroperasi di wilayahnya turut memberikan kontribusi pajak bagi daerah tempat aktivitas ekonominya berlangsung (Ritonga et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan

penggantian plat nomor dapat dimaknai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi warga dari luar daerah yang beraktivitas di Sumatera Utara. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena dianggap dapat memperbaiki sistem pajak daerah, namun tidak sedikit pula yang menilai kebijakan itu dapat memicu diskriminasi terhadap kendaraan dari provinsi lain. Perbedaan pandangan inilah yang menarik untuk dikaji dari sudut komunikasi publik.

Dalam kajian ilmu komunikasi, respon masyarakat terhadap pernyataan pejabat daerah menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik, legitimasi suatu kebijakan, serta sejauh mana komunikasi pemerintahan berjalan efektif (Pramiyanti et al., 2020). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan dan dukungan publik terhadap kebijakan, terutama di era digital yang ditandai dengan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dimensi fiskal kebijakan ini juga memiliki relevansi dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Studi mengenai kepatuhan pajak kendaraan di Indonesia menemukan bahwa sosialisasi yang efektif dan penyampaian informasi yang jelas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, strategi komunikasi pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini menurut (Mukmin et al., 2020).

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah peran media massa. Cara media online membingkai berita (*framing*) sangat menentukan bagaimana publik memaknai kebijakan tersebut. Media dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah atau justru menonjolkan sisi kontroversial yang berpotensi memunculkan resistensi publik. Oleh sebab itu, analisis terhadap konten media dan komentar warganet penting dilakukan untuk memahami persepsi yang terbentuk di masyarakat menurut (Ainani et al., 2025).

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang paling terdampak oleh isu ini. Persepsi warga Medan terhadap kebijakan pergantian plat mencerminkan bagaimana masyarakat perkotaan merespons kebijakan yang bersifat administratif namun berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Data tanggapan publik dari media daring menjadi sumber penting dalam memahami dinamika persepsi tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama, yaitu: (1) perbedaan persepsi masyarakat terhadap maksud kebijakan gubernur; (2) kurangnya kejelasan informasi mengenai implementasi kebijakan; (3) potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap pelaku usaha serta mobilitas antarwilayah; dan (4) pengaruh media online dalam membentuk opini masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi fokus dalam penelitian.

Penelitian ini penting karena persepsi publik yang keliru dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah, bahkan menimbulkan ketegangan sosial. Melalui pemahaman terhadap persepsi masyarakat, pemerintah dapat memperbaiki strategi komunikasi publiknya agar pesan kebijakan tersampaikan

secara tepat dan tidak menimbulkan interpretasi negatif di masyarakat. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa isu ini berawal dari penyebaran video dan pernyataan gubernur di media sosial, yang kemudian diberitakan secara luas oleh berbagai portal berita nasional dan lokal. Beberapa data yang relevan seperti kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sumatera Utara serta kondisi infrastruktur jalan yang sering digunakan sebagai alasan mendukung kebijakan ini turut memperkuat konteks penelitian.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa topik persepsi publik terhadap layanan pajak kendaraan telah banyak diteliti, terutama yang berkaitan dengan pelayanan Samsat dan kepatuhan pembayaran pajak. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas persepsi publik terhadap pernyataan pejabat daerah yang viral di media digital, apalagi dengan konteks isu antarwilayah seperti Sumut-Aceh. Celah penelitian (*research gap*) yang muncul adalah belum adanya studi yang mengaitkan antara persepsi masyarakat perkotaan terhadap pernyataan pejabat publik dan pembentukan opini publik melalui media online. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti bagaimana masyarakat Kota Medan menanggapi kebijakan yang bersifat administratif namun berdampak sosial menurut. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menelaah hubungan antara komunikasi fiskal pemerintah daerah dan respon masyarakat dalam konteks media digital. Isu pajak biasanya dipandang dari sudut ekonomi, bukan dari perspektif komunikasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap kajian komunikasi kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini mendesak dilakukan karena isu tersebut masih hangat

diperbincangkan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika tidak segera diklarifikasi secara akademis. Dengan rencana penerapan kebijakan ini di masa mendatang, hasil penelitian dapat dijadikan masukan strategis bagi pemerintah provinsi dalam menyusun langkah komunikasi yang lebih efektif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara tentang pergantian plat kendaraan BL menjadi plat BK/BB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menggali makna dan pandangan masyarakat secara mendalam. Teknik pengumpulan data dapat meliputi analisis isi komentar publik di media online, observasi terhadap pemberitaan media lokal, serta wawancara terstruktur dengan beberapa warga Medan sebagai informan utama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi publik agar kebijakan yang berkaitan dengan administrasi kendaraan lebih mudah diterima masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang komunikasi kebijakan dan persepsi publik di era digital.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB sangat relevan dilakukan. Isu ini bukan hanya soal administrasi kendaraan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, strategi komunikasi pemerintah, dan relasi antara kebijakan fiskal dengan opini masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Tentang Pergantian Plat Kendaraan BL Menjadi Plat BK/BB?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai imbauan pergantian pelat kendaraan BL menjadi BK atau BB. Adapun manfaat penelitian ini yaitu;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana proses penyampaian informasi pemerintah memengaruhi pembentukan opini dan sikap masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkuat penerapan teori persepsi komunikasi dan komunikasi kebijakan publik di era digital, di mana media online berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan humas agar dapat menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Bagi media massa, hasil penelitian ini menjadi acuan untuk menyajikan pemberitaan yang

berimbang terkait kebijakan publik. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan studi serupa di bidang komunikasi kebijakan. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi media serta pemahaman kritis terhadap informasi kebijakan yang beredar di ruang publik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini, penulis akan menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS : Pada bab ini, menyajikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, meliputi persepsi, komunikasi pemerintah, media massa dan pembentukan persepsi, dan citra pemerintah dan kebijakan publik.

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bab ini, menjelaskan pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi penelitian, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini, peneliti memaparkan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan dan membahasnya secara sistematis dengan mengaitkan hasil penelitian pada kerangka teori dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini, berisi simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Persepsi

Persepsi merupakan proses psikologis dan sosial yang dilakukan individu untuk memilih, mengelola, serta menafsirkan berbagai rangsangan agar memperoleh makna terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam bidang komunikasi, persepsi menjadi dasar untuk memahami bagaimana seseorang menangkap dan menginterpretasikan pesan publik (Hidayat, 2019). Persepsi tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang objektif, melainkan hasil konstruksi mental yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, latar belakang pengetahuan, dan struktur kognitif seseorang. Oleh karena itu, dua individu yang menerima informasi sama dapat memberikan penilaian dan pemaknaan berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh (Ainul Yaqin, 2023). Dalam konteks kebijakan publik, persepsi masyarakat mencakup bagaimana mereka memahami isi pesan (apa yang disampaikan), sumber pesan (siapa yang menyampaikan), dan saluran komunikasi yang digunakan. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah diterima oleh publik.

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi, misalnya faktor internal seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman hidup, dan sikap individu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi. Individu dengan wawasan luas dan pengalaman komunikasi yang baik biasanya lebih kritis dalam memproses informasi publik. Karakteristik demografis seperti usia, jenis pekerjaan, dan kondisi ekonomi turut membentuk persepsi seseorang terhadap kebijakan

menurut. Misalnya, pelaku usaha transportasi lebih sensitif terhadap kebijakan yang berdampak pada biaya operasional dibandingkan masyarakat umum. Lingkungan sosial dan budaya juga memainkan peranan penting. Norma, nilai budaya, dan pandangan kelompok sekitar dapat mengarahkan seseorang untuk menerima atau menolak suatu kebijakan seperti yang di sampaikan oleh (Camellia & Putra, 2023).

Media massa berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Cara media membingkai berita atau isu (*framing*) akan memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai kebijakan pemerintah, apakah dianggap bermanfaat, merugikan, atau diskriminatif. Kredibilitas sumber informasi menjadi faktor lain yang menentukan penerimaan pesan. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah atau media cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang disampaikan. Pengalaman pribadi masyarakat juga turut membentuk pandangan mereka. Misalnya, masyarakat yang melihat langsung dampak positif dari kebijakan tertentu lebih cenderung memiliki persepsi positif terhadap kebijakan tersebut. Situasi sosial-politik saat kebijakan diumumkan turut mempengaruhi persepsi. Komunikasi yang tidak jelas, kurangnya klarifikasi, atau munculnya kontroversi dapat memperkuat persepsi negatif di masyarakat.

Menurut (Hidayat, 2019) Proses terbentuknya persepsi terdiri atas tiga tahap utama: seleksi, organisasi, dan interpretasi. Pada tahap seleksi, individu memutuskan informasi mana yang dianggap relevan untuk diperhatikan. Tahap seleksi sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional dan kepentingan pribadi. Berita atau isu yang viral di media sosial cenderung lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan informasi yang bersifat formal. Tahap organisasi melibatkan

pengelompokan dan pengaitan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, individu menggunakan kerangka berpikir yang telah terbentuk sebelumnya untuk memahami makna dari informasi baru. Tahap interpretasi merupakan proses akhir di mana individu memberi makna dan kesimpulan terhadap informasi yang diterima. Makna ini bisa berbentuk dukungan, penolakan, atau sikap netral terhadap suatu kebijakan.

Dalam komunikasi publik, proses persepsi berlangsung secara dinamis dan saling mempengaruhi. Pesan pemerintah yang disampaikan melalui media dapat membentuk persepsi publik, sementara umpan balik dari publik juga dapat memengaruhi cara pemerintah berkomunikasi. Dalam kasus kebijakan publik, seperti imbauan pergantian plat kendaraan, proses persepsi masyarakat terjadi mulai dari paparan informasi di media, pemahaman atas isi kebijakan, hingga penilaian terhadap dampak yang dirasakan. Persepsi masyarakat tidak bersifat statis. Seiring dengan munculnya klarifikasi dari pemerintah dan peningkatan transparansi informasi, persepsi publik dapat berubah dari negatif menjadi lebih positif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pemerintah terutama dalam menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan publik.

Seperti yang dikemukakan oleh (Lubis et al., 2022) Media massa berperan penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Analisis isi media dan komentar warganet dapat membantu memahami pola persepsi publik terhadap kebijakan tertentu, baik dari sisi dukungan maupun penolakan. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disusun model konseptual di mana

komunikasi publik yang melibatkan pesan, aktor, dan media menjadi stimulus yang kemudian dipersepsi masyarakat melalui proses seleksi, organisasi, dan interpretasi. Proses ini akhirnya menghasilkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan memahami teori dan proses persepsi, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana masyarakat menilai dan merespons kebijakan pemerintah, serta memberikan dasar bagi upaya peningkatan strategi komunikasi publik agar lebih efektif, terbuka, dan partisipatif.

2.2. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah (*government communication or public communication*) merujuk pada interaksi strategis yang dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat publik dengan masyarakat dalam rangka menyampaikan kebijakan, menjangkau aspirasi, serta membangun kepercayaan publik. Fungsi utama komunikasi pemerintah adalah menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga dan memastikan pesan kebijakan dapat diterima secara efektif. Dalam konteks ilmu komunikasi, komunikasi pemerintah memiliki karakteristik unik: pesan yang disampaikan biasanya bersifat publik, regulatif, dan berhubungan dengan kepentingan kolektif. Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya diukur dari penyampaian pesan, tetapi juga dari bagaimana pesan itu diterima, dipahami, dan mendapat respon (dukungan atau penolakan) masyarakat.

Komunikasi pemerintah melibatkan unsur-unsur seperti pesan (*content*), pengirim (*government agency/ pejabat*), saluran atau media (media massa, media sosial, kanal resmi), *audiens* (masyarakat umum, segmen tertentu), serta *feed-back* (umpan balik). Semua unsur ini harus saling berkoordinasi agar komunikasinya

efektif. Sebagai aktor publik, pemerintah perlu merancang komunikasi secara sistematis: menetapkan tujuan komunikasi, merancang pesan yang jelas dan relevan, memilih media yang sesuai, dan menyediakan ruang dialog (respon masyarakat). Komunikasi pemerintah yang efektif akan meminimalkan resistensi publik terhadap kebijakan kontroversial.

Komunikasi pemerintah tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Cangara, 2019), komunikasi pemerintah yang efektif ditandai dengan keterbukaan informasi, kejelasan pesan, serta kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait pergantian plat kendaraan, efektivitas komunikasi dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menjelaskan maksud kebijakan secara transparan dan cepat, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat. Dengan demikian, kejelasan dan konsistensi informasi menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas serta citra positif pemerintah di mata publik.

Selanjutnya, komunikasi pemerintah juga perlu memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses komunikasi publik. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyampaikan kebijakan secara satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran. Menurut (Effendy, 2017) dalam ilmu komunikasi: teori dan praktek, komunikasi dua arah yang interaktif dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat karena menumbuhkan rasa keterlibatan publik dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan cara ini, masyarakat tidak

hanya menjadi penerima informasi, melainkan turut berperan sebagai mitra aktif dalam proses komunikasi pemerintahan.

Lebih jauh, keberhasilan komunikasi pemerintah pada era digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai saluran penyebaran pesan. Pemerintah perlu menyesuaikan strategi komunikasinya dengan karakter audiens yang semakin kritis dan partisipatif. Integrasi antara komunikasi konvensional dan digital akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan serta memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Melalui pendekatan ini, komunikasi pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

2.3. Media Massa dan Pembentukan Persepsi

Dalam konteks komunikasi publik, media massa berperan sebagai pembentuk realitas sosial karena dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu melalui pilihan berita dan sudut pandang pemberitaan. Melalui pemberitaan, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat memengaruhi cara individu menafsirkan realitas sosial. Dalam konteks komunikasi massa, media berfungsi sebagai perantara utama antara pemerintah, tokoh publik, dan masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana suatu isu dilihat dan dibicarakan oleh publik melalui proses penyusunan agenda dan pemingkanaan berita. Proses ini dikenal dengan istilah agenda setting dan framing, di mana media dapat menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa untuk memengaruhi

persepsi khalayak. Media massa juga dinilai berpengaruh dalam membangun citra seseorang dimata masyarakat (Adhani & Priadi, 2017).

Persepsi masyarakat terhadap suatu isu sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima secara berulang melalui media. Ketika media menampilkan citra positif atau negatif terhadap suatu pihak, maka khalayak cenderung membentuk pandangan yang sejalan dengan representasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, media massa berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai pergantian plat kendaraan dari BL menjadi BK/BB. Cara media menyoroti, menafsirkan, dan menampilkan isu tersebut akan memengaruhi bagaimana masyarakat memahami maksud serta dampak dari pernyataan tersebut. Muatan pesan iklan ini terutama untuk membentuk citra baik organisasi maupun individu serta mengajak publik untuk melihat dan mendukung organisasi atau individu yang membuat iklan (Anshori, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media massa tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk persepsi publik yang berperan dalam membangun citra dan opini terhadap suatu kebijakan atau tokoh.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik melalui fungsi informatif, edukatif, serta kontrol sosial. Dalam konteks kebijakan pergantian plat kendaraan di Sumatera Utara, media berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjelaskan tujuan serta makna dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, cara media membingkai isu (*framing*) dan menetapkan agenda

pemberitaan sangat menentukan arah persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap media turut memengaruhi bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah. Dalam era digital saat ini, masyarakat lebih sering membentuk opini berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media online dibandingkan pengalaman langsung di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Effendy, 2017) dalam Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, yang menyatakan bahwa komunikasi massa memiliki kekuatan untuk membentuk konstruksi sosial melalui penyebaran pesan yang berulang dan luas. Dengan demikian, apabila media menyampaikan kebijakan gubernur secara objektif dan berimbang, masyarakat akan cenderung memandang kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk penertiban administrasi kendaraan, bukan sebagai bentuk diskriminasi wilayah.

Lebih jauh, media massa juga berfungsi sebagai sarana klarifikasi publik ketika suatu kebijakan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, media dapat berperan memberikan edukasi dan menumbuhkan pemahaman publik yang lebih menyeluruh terhadap maksud kebijakan pemerintah. Menurut (Cangara, 2019) dalam Pengantar Ilmu Komunikasi, komunikasi massa yang efektif adalah komunikasi yang mampu menciptakan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun persepsi publik yang rasional, positif, serta berdasarkan pada informasi yang akurat.

2.4. Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik

Citra pemerintah dalam konteks politik adalah persepsi atau gambaran yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintah termasuk pejabat publik, pengambil kebijakan, serta institusi pemerintahan terkait kredibilitas, keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam menjalankan kebijakan politik. Citra pemerintah terbentuk dari cara masyarakat menilai transparansi, keadilan, serta efektivitas kebijakan yang dijalankan (Amalia & Heriyanto, 2025). Citra ini dibangun dari berbagai macam sumber: komunikasi pemerintah (proklamasi pernyataan, propaganda, humas), media massa dan media sosial, pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut dirasakan dampaknya.

Kebijakan politik juga menjadi strategi, keputusan, atau tindakan resmi pemerintah yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu, seperti stabilitas pemerintahan, legitimasi, dukungan publik, atau perubahan regulasi. Kebijakan politik tidak hanya mempengaruhi aspek teknis pemerintahan (misalnya pengelolaan plat kendaraan dalam kasus kamu), tetapi juga aspek simbolik yang digunakan publik untuk menilai pemerintah. Jika kebijakan itu dipandang adil, partisipatif, serta mengutamakan kepentingan publik, maka citra pemerintah bisa positif. Sebaliknya, kebijakan yang dirasa menguntungkan golongan tertentu saja, kurang transparan, atau menimbulkan kontroversi akan merusak citra (Karunia Isa & Lina Sinatra Wijaya, 2024).

Beberapa teori dan mekanisme yang relevan seperti teori *framing* yang bagaimana media dan pemerintah menyajikan aspek-aspek dari kebijakan (misalnya PLAT kendaraan) menentukan “*frame*” yang akan diingat masyarakat.

Misalnya *framing* bahwa pergantian plat “kemudahan administratif” versus “beban tambahan”. Lalu ada teori agenda setting yang dimana media dan pemerintah menentukan isu mana yang ditonjolkan dalam publik, yang mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Setelah itu ada komunikasi publik dan *public relations* pemerintah dimana pernyataan resmi, sosialisasi kebijakan, transparansi, serta kanal komunikasi yang digunakan (media massa, media sosial, surat kabar, konferensi pers) mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kebijakan dan siapa yang membuat kebijakan. Legitimasi politik dan kepercayaan publik tentang citra pemerintah yang baik akan memperkuat legitimasi kebijakan politik di mata rakyat, sebaliknya, kepercayaan publik bisa rusak bila kebijakan dianggap tidak adil atau disosialisasikan dengan buruk.

2.5. Anggapan Dasar

Penelitian ini berlandaskan pada anggapan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan media massa. Faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan pandangan kelompok sosial memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Media massa, melalui *framing* berita, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, sementara komunikasi pemerintah yang jelas dan transparan sangat menentukan penerimaan kebijakan. Selain itu, opini publik yang terbentuk dapat mempengaruhi legitimasi kebijakan, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap persepsi masyarakat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan resistensi sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena berfokus pada upaya memahami persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara mengenai perubahan plat kendaraan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna subjektif yang muncul dari interaksi sosial masyarakat dan bagaimana mereka menafsirkan kebijakan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif dianggap tepat karena mampu menampilkan gambaran mendalam tentang pengalaman dan interpretasi individu secara natural. Sejalan dengan pendapat (Moleong, 2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan melalui penggunaan kata-kata dan deskripsi yang kontekstual.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan fenomena sosial sebagaimana adanya, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap variabel. Sebagaimana dinyatakan oleh (Sugiyono, 2019), penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara terstruktur dan faktual berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial yang dialami oleh masyarakat Kota Medan secara holistik. Menurut (Creswell, 2019),

penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang muncul dari pengalaman individu terhadap fenomena tertentu dan menekankan pentingnya konteks sosial dalam interpretasi data. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai reaksi dan pandangan masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara.

3.2. Kerangka Konsep



Sumber: Olahan Peneliti 2025

3.3. Definisi Konsep

Konsep dapat diartikan sebagai gagasan atau pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berikut ini merupakan beberapa pengertian konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji:

- a. Persepsi masyarakat diartikan sebagai proses mental dan emosional di mana individu menyeleksi, mengelola, serta menafsirkan informasi dari lingkungan sosialnya hingga menghasilkan pemaknaan tertentu terhadap suatu fenomena atau kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, istilah

tersebut menggambarkan cara warga Kota Medan memahami pernyataan gubernur terkait pergantian plat kendaraan suatu proses yang dipengaruhi oleh latar pengalaman, tingkat pengetahuan, dan eksposur terhadap media.

- b. Komunikasi pemerintah dimaknai sebagai pernyataan gubernur Sumatera Utara yang melarang penggunaan plat BL diwilayah Sumatera Utara sehingga menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat Sumatera Utara terutama kota Medan. Itu semua merupakan rangkaian aktivitas sistematis oleh lembaga atau pejabat publik yang bertujuan menyampaikan informasi, kebijakan, atau keputusan kepada masyarakat, guna membangun pemahaman, partisipasi, dan legitimasi publik. Unsur-unsur penting meliputi pesan, pengirim, saluran, audiens, dan umpan balik.
- c. Media massa dan platform digital tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembingkai (*framing*) dan penetapan agenda yang dapat memengaruhi fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Dalam konteks kebijakan pemerintah provinsi, pemberitaan di media serta diskusi di media sosial turut menentukan bagaimana masyarakat memaknai pernyataan para pejabat.
- d. Konteks sosial masyarakat Kota Medan mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan media yang mempengaruhi cara masyarakat di Medan menerima, memahami, dan merespons pesan kebijakan pemerintah. Konteks ini penting karena makna dan persepsi kebijakan tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan dalam situasi sosial yang spesifik.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi Penelitian	Indikator Penelitian
Persepsi Masyarakat Kota Medan Atas Pernyataan Gubernur Sumut Tentang Pergantian Plat BL Menjadi Plat BK/BB	• Pemahaman masyarakat • Peran media massa dan pembentukan persepsi • Citra pemerintah dan kebijakan publik • Komunikasi pemerintah

Sumber: Olahan Peneliti 2025

3.5. Informan atau Narasumber

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: narasumber dengan latar belakang dan pendidikan yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda serta latar belakang keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda untuk memperoleh variasi persepsi dan pengalaman. Dalam penelitian ini, informan yang diambil untuk mendeskripsikan hasil penelitian meliputi masyarakat yang berprofesi sebagai sekuriti/satpam, pedagang, dan pekerja pada sektor informal.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan agar peneliti dapat menggali secara bebas persepsi dan pandangan masyarakat Kota Medan terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara mengenai pergantian plat kendaraan dari BL menjadi BK/BB. Observasi diterapkan di beberapa lokasi publik seperti kampus, pasar, dan ruas jalan

utama untuk memahami konteks sosial serta bentuk respons masyarakat terhadap isu tersebut. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berita daring dan unggahan media sosial guna memperkuat serta melengkapi temuan hasil wawancara dan observasi.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu melalui pendekatan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas dan kedalaman data penelitian. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengamati, mencatat, dan menafsirkan data dari berbagai sumber secara objektif. Selain itu, ((Vera Nurfajriani et al., 2024) menegaskan bahwa penerapan triangulasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Matthew B. Miles, 2018), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

- a. Reduksi data, merupakan tahap awal dalam proses analisis, yaitu kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.
- b. Penyajian data, Langkah ini dilakukan untuk menata data secara sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan informasi dan menarik simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna dari data yang telah dianalisis dan memverifikasi hasil temuan untuk memastikan validitasnya.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, karena wilayah ini merupakan pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang menjadi fokus penerapan kebijakan. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Januari 2026.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian



Sumber: dokumentasi peneliti, Desember 2025

Kota Medan merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas utama di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakter demografis sangat beragam. Penduduk Kota Medan terdiri dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu wilayah perkotaan. Keberagaman tersebut membentuk pola interaksi sosial yang dinamis serta menciptakan ruang publik yang heterogen, di mana perbedaan pandangan dan sikap terhadap isu-isu sosial maupun kebijakan publik sering muncul. Kondisi demografis ini menjadikan Kota Medan sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dari segi kependudukan, Kota Medan termasuk kota dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, terutama di kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. Kepadatan ini berdampak langsung pada tingginya mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pergerakan penduduk terjadi

hampir sepanjang hari, baik untuk kepentingan bekerja, berdagang, pendidikan, maupun aktivitas sosial lainnya. Mobilitas yang tinggi tersebut menjadikan sarana transportasi dan kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari.

Aktivitas ekonomi masyarakat Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan usaha kecil menengah. Banyak warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi, seperti distribusi barang, layanan transportasi, serta usaha informal yang tersebar di berbagai sudut kota. Kondisi ini menyebabkan isu-isu yang berkaitan dengan transportasi, administrasi kendaraan, dan kebijakan lalu lintas menjadi sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah yang menyentuh aspek tersebut cenderung mendapat perhatian luas karena berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga. Selain itu, masyarakat Kota Medan juga menunjukkan tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap media massa dan media digital. Media sosial menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan isu-isu publik. Pola konsumsi informasi yang cepat dan beragam ini turut memengaruhi cara masyarakat membentuk persepsi terhadap kebijakan yang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, karakter masyarakat Kota Medan yang aktif, kritis, dan responsif terhadap informasi menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji bagaimana persepsi publik terbentuk melalui interaksi antara komunikasi pemerintah, pemberitaan media, dan pengalaman sosial masyarakat.

4.2. Identitas Narasumber

Berdasarkan lokasi diatas peneliti mendapatkan 4 narasumber pada Persepsi Masyarakat Kota Medan Atas Pernyataan Gubernur Sumut Tentang Pergantian Plat BL Menjadi BK/BB dari berbagai latar belakang yaitu, Narasumber pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Joni Ahmad, berusia 63 tahun, yang berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu gerai makanan cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Dalam menjalankan pekerjaannya, Bapak Joni berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, seperti pengunjung, karyawan, serta pengguna kendaraan yang datang dan pergi di area tersebut. Ia berdomisili di Jalan Sering, Kecamatan Medan Tembung, yang membuatnya memiliki pengalaman sosial yang cukup luas sebagai warga Kota Medan.

Gambar 4.4. Informan Joni Ahmad



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Desember 2025

Narasumber kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Dedi Renaldi, berusia 40 tahun, yang saat ini bekerja sebagai petugas keamanan (sekuriti) di salah satu gerai makanan cepat saji yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Bapak Dedi telah menekuni profesi tersebut selama lebih dari lima tahun, sehingga memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang serta pemahaman yang baik

terhadap dinamika lingkungan kerja dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selain menjalankan tugas profesionalnya, narasumber juga berdomisili di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Johor, yang menjadikan ia aktif berinteraksi dengan masyarakat perkotaan dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 4.5 Informan Dedi Renaldi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Desember 2025

Narasumber ketiga dalam penelitian ini adalah Bapak Herry Andhika, berusia 42 tahun, yang berprofesi sebagai driver sekaligus penjaga rumah kos. Aktivitas kerjanya berlokasi di Jalan Gaharu, Gang Amat Lama, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Selain menjalankan tugas sebagai pengemudi (*driver*), Bapak Herry juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan rumah kos yang dijaganya, sehingga ia memiliki interaksi yang intens dengan penghuni kos serta masyarakat sekitar. Sebagai penjaga kos, Bapak Herry menetap langsung di lokasi tersebut, yakni di Gang Amat Lama, Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur yang membuat ia terlibat secara langsung dalam dinamika kehidupan sosial lingkungan setempat.

Gambar 4.6 Infoman Herry Andika



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Desember 2025

Narasumber keempat dalam penelitian ini adalah Ibu Lasda Meria, berusia 46 tahun, yang berprofesi sebagai pedagang minuman dan makanan ringan. Aktivitas usahanya berlokasi di Jalan Bukit Barisan, tepatnya di depan Kantor Pos Medan, salah satu kawasan pusat aktivitas masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Lasda berinteraksi langsung dengan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pekerja kantor, pengguna jasa, hingga masyarakat umum yang melintas di kawasan tersebut. Selain sebagai pedagang, Ibu Lasda juga berdomisili di Perumnas Helvetia, Kota Medan, yang menjadikannya bagian dari masyarakat perkotaan dengan pengalaman sosial yang beragam.

Gambar 4.7 Infoman Lasda Meria



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Desember 2025

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai kebijakan pergantian plat kendaraan BL menjadi BK/BB terbentuk melalui interaksi antara pemahaman administratif, pengalaman sosial masyarakat, serta intensitas paparan informasi dari berbagai media. Sebagian masyarakat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai upaya penertiban administrasi kendaraan sekaligus peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya bagi kendaraan yang beroperasi dan memperoleh keuntungan ekonomi secara menetap di wilayah Sumatera Utara. Pandangan ini umumnya muncul pada masyarakat yang memaknai kebijakan dari perspektif kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban fiskal. Namun, di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang merasa kebijakan tersebut menimbulkan kebingungan akibat kurangnya penjelasan resmi yang menyeluruh, sehingga memunculkan anggapan adanya pembatasan atau perlakuan berbeda terhadap kendaraan dari luar daerah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat bersifat beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat keterpaparan informasi, serta keterkaitan kebijakan dengan aktivitas keseharian mereka.

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa media massa, terutama media sosial, memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk persepsi awal masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Sebagian besar informan mengaku pertama kali memperoleh informasi mengenai isu pergantian plat kendaraan melalui platform digital seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp, yang menyajikan informasi secara cepat, singkat, dan mudah menyebar. Penyajian

informasi di media sosial sering kali tidak disertai penjelasan kebijakan secara utuh, sehingga membuka ruang bagi munculnya beragam penafsiran di kalangan masyarakat. Perbedaan antara judul dan isi pemberitaan, serta berkembangnya narasi di ruang digital, turut memperkuat kesan kontroversial terhadap kebijakan yang pada dasarnya bersifat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa framing media dan karakteristik media sosial berperan signifikan dalam memperluas polemik serta membentuk opini publik, terutama ketika informasi resmi dari pemerintah belum tersampaikan secara jelas dan konsisten.

Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa komunikasi pemerintah merupakan faktor penting dalam menentukan arah persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik. Kurangnya sosialisasi yang terencana, keterbatasan penjelasan langsung dari pihak berwenang, serta tidak adanya ruang komunikasi terbuka seperti konferensi pers mendorong masyarakat untuk mengandalkan informasi dari media dan percakapan informal dalam memahami kebijakan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai kebijakan terkesan disampaikan secara mendadak dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial maupun ekonomi yang mungkin timbul. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam strategi komunikasi pemerintah dapat mengurangi kejelasan pesan kebijakan dan berpotensi memengaruhi citra pemerintah dimata publik. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan, mudah dipahami, dan responsif menjadi elemen penting agar kebijakan publik dapat diterima secara lebih positif serta meminimalkan terjadinya kesalahpahaman ditengah masyarakat.

4.3.1. Pemahaman Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana masyarakat membentuk persepsi berdasarkan kedekatan mereka dengan isu yang berkembang di ruang publik, termasuk kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB. Tingkat keselarasan antara pengalaman pribadi, kebutuhan sehari-hari, serta latar belakang sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi cara mereka menilai kebijakan pemerintah tersebut. Kesamaan situasi dan kepentingan, misalnya bagi pengendara yang sering berpindah provinsi atau pedagang yang beroperasi lintas daerah dapat menimbulkan rasa kebersamaan dalam menolak ataupun menerima kebijakan tersebut. Identitas sosial masyarakat, baik sebagai warga lokal, pekerja formal, maupun pelaku sektor informal, juga membentuk cara mereka merespons kebijakan, apakah dengan menonjolkan pandangan kritis atau mengikuti arus opini publik yang berkembang. Ketika beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang merasa tidak terdampak cenderung bersikap lebih netral, sekaligus menegaskan bahwa identitas sosial dan kebutuhan praktis memainkan peran penting dalam menentukan arah persepsi.

Meskipun demikian, masyarakat tetap dapat terhubung melalui diskusi publik, bertukar argumen, dan saling memberi umpan balik terkait isu ini, baik melalui percakapan langsung maupun media digital. Sebagaimana disampaikan oleh informan bapak Joni, ketika peneliti bertanya bagaimana Anda mengetahui

pernyataan gubernur terkait pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan joni menjawab;

"Ya, wajarlah pemerintah Sumut kan mau mencari pajak dari kendaraan. Makanya harus pajak kendaraan itu memang orang operasi BK itu enggak boleh di Aceh sebenarnya, karena orang Medan yang pengusahanya ya dikenakan pajak itu diubah".

Informan menyatakan bahwa dapat dinilai adanya kebijakan Pemerintah Sumut yang dituang untuk mengatur pajak dari kendaraan. Hal ini dikarenakan sebagian besar mayoritas masyarakat kota medan yang berprofesi sebagai pengusaha melakukan mobilisasi ke aceh. Terkait pengaturan pajak kendaraan merupakan hal yang dapat dipahami. Ia menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di suatu wilayah seharusnya mengikuti aturan pajak yang berlaku di daerah tersebut. Informan tersebut memberi contoh bahwa kendaraan berplat BK yang beraktivitas di Aceh semestinya tidak diizinkan beroperasi tanpa menyesuaikan kewajiban pajaknya, karena pemilik kendaraan termasuk para pengusaha dari Medan tetap berkewajiban membayar pajak di daerah tempat kendaraan digunakan. Dengan demikian, menurutnya, penyesuaian administrasi kendaraan memang diperlukan agar sesuai dengan kebijakan pajak daerah. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang isu pergantian plat kendaraan dari sisi kepatuhan administratif dan regulasi pajak antarwilayah, bukan sebagai bentuk pembatasan atau diskriminasi. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, bagaimana Anda mengetahui pernyataan gubernur terkait pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

"Itu wajarlah, operasi kerjanya di daerah Sumut dan sudah seharusnya pajak kendaraannya jatuh ke Sumut".

Bahwa kebijakan penertiban plat kendaraan dianggapnya masuk akal apabila dikaitkan dengan wilayah operasional kendaraan tersebut. Ia berpendapat bahwa apabila sebuah kendaraan beraktivitas dan digunakan untuk bekerja di wilayah Sumatera Utara, maka sudah sewajarnya kewajiban pajaknya juga disetorkan ke pemerintah daerah Sumut. Menurut informan Dedi, prinsip administrasi kendaraan menekankan kesesuaian antara lokasi penggunaan dan pembayaran pajak, sehingga penyesuaian plat dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan daerah. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memaknai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengaturan administratif yang rasional, bukan sebagai kebijakan yang bersifat membatasi kendaraan dari luar wilayah. Ketika peneliti bertanya, bagaimana Anda mengetahui pernyataan gubernur terkait pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Katanya plat BL dilarang di Sumatera Utara ya kan. Jadi mungkin ya bisa menjadi isu politik atau gimana, enggak tahu lah itu. Jadi bisa menambah ekonomi yang mampet jadinya di Sumut ya kan” .

Informan mengemukakan bahwa kabar mengenai pelarangan plat BL di Sumatera Utara dapat memicu berbagai tafsir di masyarakat, termasuk dugaan bahwa isu tersebut mungkin berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran publik, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kondisi ekonomi di Sumut. Informan tersebut juga menilai bahwa jika isu ini tidak segera diluruskan, hal tersebut dapat memperburuk situasi ekonomi yang sudah berjalan lambat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat

tidak hanya memandang isu pergantian plat sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai isu yang berpotensi mengganggu dinamika sosial dan ekonomi daerah. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakjelasan informasi membuka peluang bagi munculnya interpretasi spekulatif di ruang publik, termasuk asumsi mengenai politisasi kebijakan. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, bagaimana anda mengetahui pernyataan gubernur terkait pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Saya kurang sependapat dengan pernyataan gubernur tentang pergantian plat BL itu. Omongan itu kayak buat bingung, apalagi bagi masyarakat yang masih menggunakan plat luar daerah. Muncul kayak kesan seolah-olah ada pembatasan, sementara aturan dan penjelasannya belum begitu jelas”.

Ketidaksepakatan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB. Ia berpendapat bahwa pernyataan tersebut cenderung menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan dengan plat luar daerah. Informan menilai bahwa penyampaian kebijakan tersebut memunculkan persepsi seolah-olah terdapat pembatasan terhadap kendaraan dari luar wilayah, sementara ketentuan dan penjelasan resmi mengenai kebijakan tersebut belum disosialisasikan secara jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi negatif masyarakat muncul bukan semata-mata karena isi kebijakan, tetapi juga akibat lemahnya kejelasan komunikasi pemerintah dalam menjelaskan tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut. Ketika peneliti bertanya pada informan bapak Joni, bagaimana penilaian Anda tentang pernyataan Gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Joni menjawab;

“kalau BL itu masuk ke Sumut, ya harus bergantian, kecuali pengangkutan manusia, orang, bus. Itu kan sudah diatur di dalam undang-undang perhubungan”.

Pergantian plat kendaraan dari BL menjadi BK/BB dianggapnya logis apabila kendaraan tersebut beroperasi secara tetap di wilayah Sumatera Utara. Ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan yang mengangkut penumpang, seperti bus atau angkutan umum, karena jenis transportasi tersebut memiliki aturan tersendiri sebagaimana diatur dalam regulasi perhubungan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami isu pergantian plat berdasarkan kerangka aturan transportasi, dimana kewajiban administratif ditentukan oleh fungsi dan wilayah operasional kendaraan. Temuan ini juga mengisyaratkan bahwa persepsi masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh opini publik di media sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang mengetahui dasar regulasi cenderung melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk penertiban administratif, bukan sebagai langkah pembatasan kendaraan dari luar daerah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, bagaimana penilaian Anda tentang pernyataan Gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

“Wajar juga, menurut pemerintah Sumut mengatakan karena Pemda Sumut harus mendapat pajak kendaraannya yang berdomisi dan beroperasi di wilayah Sumut”.

Informan menilai bahwa kebijakan pergantian plat kendaraan dari BL menjadi BK/BB merupakan hal yang wajar apabila dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui pajak

kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak memperoleh pemasukan pajak dari kendaraan yang beroperasi dan berdomisili di wilayahnya, sehingga penyesuaian administrasi seperti perubahan plat dinilai sebagai langkah yang logis. Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bermotivasi politis atau diskriminatif, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendapatan pajak kendaraan sesuai dengan wilayah tempat kendaraan digunakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat memaknai kebijakan dari sisi fiskal dan tata kelola administrasi, yang dianggap sah sebagai bentuk penguatan penerimaan daerah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, bagaimana penilaian Anda tentang pernyataan Gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Seharusnya jangan terlalu ambil tindakan cepat, kan. Karena di mana pun plat BK juga ada di provinsi lain kan. Jadi jangan terlalu ambil keputusan yang begitu cepat lah”.

Pemerintah sebaiknya tidak mengambil keputusan secara terburu-buru terkait isu pergantian plat BL menjadi BK/BB. Ia berpendapat bahwa kendaraan berplat BK juga banyak beroperasi di berbagai provinsi lain, sehingga keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan matang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Informan tersebut menekankan perlunya proses pengambilan kebijakan yang lebih hati-hati dan terencana, terutama dalam isu yang sensitif dan berdampak luas seperti administrasi kendaraan dan mobilitas lintas daerah. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai substansi kebijakan harus diimbangi dengan komunikasi yang jelas dan proses penetapan

kebijakan yang tidak tergesa-gesa agar tidak menimbulkan polemik atau kesalahpahaman publik. Ketika peneliti bertanya pertanyaan kepada ibu Lasda, bagaimana penilaian Anda tentang pernyataan Gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Kalau menurut saya, pernyataan gubernur soal pergantian plat BL itu agak sulit diterima, saya juga belum sepenuhnya paham maksudnya. Yang saya lihat, pernyataan itu terkesan mendadak, apalagi penjelasan yang beredar di media itu beda-beda”.

Informan menyampaikan bahwa pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai pergantian plat BL dinilai sulit dipahami dan belum sepenuhnya jelas maksud serta tujuannya. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut terkesan disampaikan secara mendadak tanpa diiringi penjelasan yang komprehensif, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Selain itu, informan menyoroti perbedaan informasi yang beredar di berbagai media, yang semakin memperkuat ketidakpastian publik terhadap kebijakan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan informasi dan kurangnya klarifikasi resmi dari pemerintah berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat yang cenderung ragu dan kritis. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran media massa dalam menyampaikan informasi kebijakan sangat menentukan dalam membentuk pemahaman publik, terutama ketika komunikasi pemerintah belum disampaikan secara terstruktur dan seragam.

4.3.2. Peran Media Massa dan Pembentukan Persepsi

Media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk isu pergantian plat BL menjadi

BK/BB. Berbagai kanal media, baik televisi, portal berita daring, maupun media sosial menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami substansi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui isu ini untuk pertama kalinya melalui media sosial karena sifatnya yang cepat dan mudah diakses. Cara media mengemas berita, mulai dari pemilihan judul hingga cara pernyataan gubernur dibingkai, berperan besar dalam menentukan apakah publik memandang kebijakan tersebut sebagai pelarangan kendaraan atau sebagai langkah penertiban administratif. Meskipun media sosial menjadi sumber informasi yang paling dominan, media konvensional seperti televisi tetap memiliki tempat tersendiri bagi sebagian masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka lebih percaya pada informasi yang disampaikan melalui televisi karena dianggap telah melalui proses verifikasi yang lebih ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa media konvensional masih memiliki kredibilitas dan pengaruh, meskipun tingkat konsumsinya mulai menurun dikalangan masyarakat yang aktif menggunakan internet. Perbedaan preferensi media ini menimbulkan variasi persepsi di masyarakat, di mana ada yang menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah pengawasan teknis, sementara yang lain menafsirkan sebagai upaya pembatasan kendaraan dari luar daerah.

Di sisi lain, media massa juga berpotensi memperkuat atau menciptakan kesalahpahaman publik. Beberapa informan menilai bahwa isu pergantian plat BL menjadi BK/BB diperbesar oleh pemberitaan media dan percakapan di media sosial, sehingga memunculkan dugaan yang keliru mengenai maksud kebijakan gubernur. Informasi yang tidak lengkap, judul-judul berita yang provokatif, serta

diskusi yang berlangsung di ruang komentar media sosial turut membentuk bias persepsi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa cara informasi disajikan dan direproduksi oleh media serta interaksi antarpengguna diplatform digital menjadi faktor penting dalam membentuk interpretasi masyarakat terhadap suatu kebijakan. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, bagaimana anda melihat pemberitaan media terkait pernyataan Gubernur Sumut yang melarang plat BL memasuki Sumut? Informan Joni menjawab;

“Iya media pasti juga mengangkat isu ini ,ya bukan melarang sebenarnya pemerintah daerah Sumatera Utara. Karena dia merasa misal BL ke Medan, ya dia kan mau cari pajaknya juga. Untuk mengambil pajaknya, ya harus di ubah dari BL ke BK. Itu untuk menggapai pajaknya, pajak kendaraannya”.

Informan berpendapat bahwa pemberitaan media turut memperbesar polemik terkait isu pergantian plat BL menjadi BK/BB, sehingga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pelarangan terhadap kendaraan berplat BL. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejatinya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kendaraan yang beroperasi di wilayah Medan. Menurut informan, penyesuaian plat kendaraan diperlukan agar kewajiban pajak dapat disalurkan ke pemerintah daerah Sumatera Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa cara media membingkai kebijakan berpengaruh besar terhadap pemahaman publik, terutama ketika informasi kebijakan tidak disampaikan secara menyeluruh dan konsisten oleh pemerintah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, bagaimana anda melihat pemberitaan media terkait pernyataan Gubernur Sumut yang melarang plat BL memasuki Sumut? Informan Dedi menjawab;

“Wajar saja karena Sumut mau mendapatkan pajak kendaraan pengguna untuk mendapatkan APBD daerahnya”.

Pergantian plat kendaraan dari BL menjadi BK/BB dapat dipahami sebagai langkah yang wajar karena berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ia menilai bahwa pajak kendaraan merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di wilayahnya turut memberikan kontribusi fiskal. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi penguatan keuangan daerah, bukan sebagai upaya pembatasan kendaraan dari luar wilayah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, bagaimana anda melihat pemberitaan media terkait pernyataan Gubernur Sumut yang melarang plat BL memasuki Sumut? Informan Herry menjawab;

“Ya, kalau itu terlalu dibesar-besarkan menurut saya. Jadi ada unsur-unsur di balik itu kan. Jadi kalau media sosial tahu zamannya sekarang media sosial. Viral-viral-viral ya kan. Ah, itu aja”.

Isu polemik pergantian plat BL menjadi BK/BB telah mengalami pembesaran yang berlebihan, terutama melalui media sosial. Ia menilai bahwa karakteristik media sosial yang menekankan pada penyebaran konten viral mendorong munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya, fokus pada viralitas sering kali mengesampingkan substansi kebijakan yang sebenarnya, sehingga menghasilkan persepsi publik yang tidak seimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk opini masyarakat, khususnya melalui mekanisme penyebaran informasi yang cepat dan

masif, yang berpotensi memperkuat kontroversi meskipun konteks kebijakan belum dipahami secara utuh. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, bagaimana anda melihat pemberitaan media terkait pernyataan Gubernur Sumut yang melarang plat BL memasuki Sumut? Informan Lasda menjawab;

“Dari berita yang saya lihat, macam Gubernur Sumut melarang kendaraan plat BL ini masuk ke Sumatera Utara. Padahal, saya sendiri tidak menemukan penjelasan yang tegas apakah itu larangan resmi atau hanya imbauan. Karena judul dan isi berita berbeda beda ya, masyarakat juga jadi mudah salah paham menilai kebijakan ini gitu”.

Pemberitaan media menampilkan kesan seolah-olah Gubernur Sumatera Utara secara tegas melarang kendaraan berplat BL memasuki wilayah Sumut. Namun demikian, ia menilai tidak terdapat kejelasan apakah pernyataan tersebut merupakan kebijakan resmi berupa larangan atau hanya bersifat imbauan. Informan juga menekankan adanya perbedaan antara judul dan isi berita di berbagai media, yang menurutnya turut memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penyajian informasi media dapat memengaruhi cara publik memahami kebijakan pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa variasi framing media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat, khususnya ketika informasi kebijakan tidak disampaikan secara utuh dan konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang pernyataan pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Joni menjawab;

“Di media sosial facebook dan tiktok dibanding lihat di tv karena di zaman sekarang ini arus media yang lebih cepat itu di medsos dibanding televisi”.

Bahwa media sosial, terutama Facebook dan TikTok, dianggap sebagai sumber informasi yang paling dominan karena mampu menyebarkan informasi dengan lebih cepat dibandingkan media televisi. Informan memandang bahwa perubahan perkembangan teknologi dan zaman telah memengaruhi cara masyarakat mengakses informasi, sehingga media digital menjadi sarana utama dalam memperoleh berita terbaru, termasuk terkait kebijakan publik. Dari temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran pola komunikasi publik dari media konvensional menuju media digital yang bersifat instan, interaktif, dan partisipatif. Fenomena tersebut menegaskan besarnya peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat, sekaligus menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan secara efektif di tengah arus informasi yang cepat dan kurang terfilter. Oleh karena itu, dominasi media sosial dalam penyebaran informasi menjadi faktor krusial dalam membentuk opini publik serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang pernyataan pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

“Saya mengetahui dari media sosial facebook, karena lebih mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja”.

Facebook dipilih sebagai sumber informasi utama karena kemudahan akses yang ditawarkan, baik dari segi waktu maupun lokasi. Informan memandang bahwa fleksibilitas media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat tanpa keterbatasan ruang dan waktu, sehingga lebih praktis dibandingkan media konvensional. Temuan ini menggambarkan perubahan pola konsumsi

informasi masyarakat yang semakin bergantung pada media digital sebagai sarana utama dalam memahami isu publik, termasuk kebijakan pemerintah. Fenomena tersebut menegaskan bahwa karakter media sosial yang mudah diakses dan bersifat personal berkontribusi besar dalam membentuk persepsi masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang beredar di ruang digital tetap akurat dan dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, kemudahan akses media sosial menjadi faktor penting dalam proses pembentukan opini dan pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, darimana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang pernyataan pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Ya dari media sosial juga sih seperti tiktok atau snack video, arus berita yang berkembang sekarang ini dimulai dari situ deluan”.

Media sosial dengan format visual dan durasi singkat semakin berperan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengikuti isu kebijakan publik. Karakteristik platform tersebut yang mengutamakan kecepatan penyebaran dan daya tarik visual berpotensi memengaruhi cara masyarakat menangkap serta menafsirkan informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa paparan informasi melalui media sosial video pendek cenderung membentuk pemahaman yang cepat, namun tidak selalu mendalam, terutama ketika informasi disajikan tanpa konteks dan klarifikasi resmi yang memadai. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu lasda, dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang pernyataan pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Dari facebook sama whatsapp, selain gampang ditemukan, berita dari media sosial cenderung lebih update dibanding di layar kaca (televisi)”.

Informan memandang media sosial sebagai sumber informasi yang lebih mudah diakses dan lebih cepat dalam menyajikan berita dibandingkan media televisi. Informan menilai bahwa kecepatan pembaruan informasi di media sosial membuat masyarakat lebih mengandalkan platform digital tersebut untuk mengikuti perkembangan isu terkini. Temuan ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi media masyarakat, di mana media sosial menjadi kanal utama dalam distribusi informasi publik. Fenomena ini menegaskan bahwa karakter media sosial yang *real-time* dan mudah diakses berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat, sekaligus menghadirkan tantangan bagi komunikasi pemerintah untuk memastikan keakuratan dan kejelasan informasi di tengah derasnya arus berita digital. Dengan demikian, dominasi media sosial dalam penyebaran informasi memperlihatkan pengaruh kuatnya terhadap pembentukan opini dan pemahaman publik mengenai kebijakan pemerintah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, apakah anda merasa media sosial memperbesar pro dan kontra mengenai pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Joni menjawab;

“Tidak. Karena wajar kendaraan tersebut sudah berdomisili di medan tapi di memakai plat BL, misalnya di Medan atau di Aceh, ya harus di ubah. Kecuali dia masih lintas saja, enggak jadi masalah. Ini kan dia bekerja, dapat duit”.

Pandangan informan mengindikasikan bahwa kebijakan pergantian plat kendaraan dinilai masuk akal apabila kendaraan tersebut telah menetap dan digunakan secara aktif di wilayah Kota Medan. Dari sudut pandang informan,

penggunaan plat BL pada kendaraan yang beroperasi dan menghasilkan pendapatan di Sumatera Utara sudah seharusnya disesuaikan dengan wilayah domisilinya, kecuali kendaraan tersebut hanya bersifat sementara atau lintas daerah. Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima kebijakan publik ketika kebijakan tersebut dipahami sebagai bagian dari penertiban administrasi yang adil dan relevan dengan aktivitas ekonomi. Persepsi ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap konteks penggunaan kendaraan berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat, sehingga kebijakan tidak dipandang sebagai pembatasan, melainkan sebagai kewajiban administratif yang wajar. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, apakah anda merasa media sosial memperbesar pro dan kontra mengenai pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

“Tidak. Karena masyarakat harus tahu masalah plat BK menjadi dirubah menjadi plat BL apabila daerah operasinya itu menetap di Sumut”.

Bahwa pergantian plat kendaraan dipandang sebagai bentuk penyesuaian administrasi yang perlu dipahami oleh masyarakat sesuai dengan wilayah operasional kendaraan. Informan melihat kebijakan ini bukan sebagai larangan, melainkan sebagai kewajiban administratif bagi kendaraan yang menetap dan beraktivitas di wilayah Sumatera Utara. Pandangan tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap kebijakan pemerintah, selama aturan tersebut disertai dengan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap tujuan kebijakan, sehingga munculnya penolakan atau kesalahpahaman lebih disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi kebijakan

dibandingkan oleh substansi kebijakan itu sendiri. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, apakah anda merasa media sosial memperbesar pro dan kontra mengenai pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Ya seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan lah di media sosial. Takutnya nanti jadi isu-isu SARA, kan”.

Isu terkait kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB sebaiknya tidak dibesar-besarkan di media sosial. Ia mengkhawatirkan bahwa penyebaran informasi yang berlebihan dapat memicu munculnya isu-isu sensitif, termasuk yang berkaitan dengan SARA. Pandangan ini menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dari arus informasi yang tidak terkelola dengan baik di ruang digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa media sosial memiliki potensi tidak hanya dalam membentuk persepsi publik, tetapi juga dalam memicu gesekan sosial apabila informasi kebijakan disebarkan tanpa konteks dan tanggung jawab yang memadai. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, apakah anda merasa media sosial memperbesar pro dan kontra mengenai pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Saya merasa media sosial cukup besar besarkan ya, tapi karena banyak pemberitaan yang beda-beda, kesannya jadi seolah-olah kebijakan ini memang bermasalah dan menimbulkan kontroversi”.

Beragamnya pemberitaan dengan perspektif yang berbeda-beda menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut mengandung masalah dan memicu polemik. Informan menjelaskan bahwa variasi narasi yang berkembang di ruang digital menyulitkan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh maksud dan tujuan kebijakan yang dimaksud. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak

konsisten di media sosial berpotensi membentuk persepsi publik yang cenderung negatif, meskipun substansi kebijakan tidak selalu sekompleks yang dipersepsikan. Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam membangun kontroversi kebijakan melalui penyajian informasi yang terfragmentasi dan perbedaan framing yang tersebar di tengah masyarakat.

4.3.3. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pergantian plat kendaraan BL menjadi BK/BB belum sepenuhnya berlangsung secara efektif di tingkat masyarakat. Pernyataan gubernur yang disampaikan di ruang publik cenderung bersifat normatif dan belum disertai penjelasan teknis yang rinci, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam. Ketidakjelasan pesan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kebingungan dalam memahami apakah kebijakan yang disampaikan bersifat imbauan administratif atau merupakan bentuk larangan resmi. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi pemerintah yang tidak terstruktur dengan baik berpotensi menimbulkan distorsi makna di tengah publik, terutama ketika pesan kebijakan disampaikan melalui media yang memiliki jangkauan luas dan penyebaran cepat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengelolaan komunikasi antara pemerintah dan media massa turut memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Informasi yang beredar di media kerap tidak diikuti dengan klarifikasi resmi yang konsisten, sehingga pemberitaan berkembang dengan sudut pandang yang beragam. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan

substansi kebijakan. Akibatnya, komunikasi pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai sarana edukasi publik justru dipersepsikan sebagai sumber kontroversi. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi pesan dan koordinasi komunikasi yang terintegrasi dalam penyampaian kebijakan publik. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, menurut anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Joni menjawab;

“Ya enggak salahlah. Itu kan ada di Undang-Undang Dinas Perhubungan bahwa daerah mana dia memasuki kalau bila perlu memang masyarakat di situ. Ah, berarti zona zonanya, truk-truk yang besar, jadi ada pajak daerah bersangkutan”.

Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pergantian plat kendaraan didasarkan pada pemahaman mengenai aspek hukum dan regulasi yang berlaku. Kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai langkah yang tepat karena dianggap memiliki dasar dalam ketentuan perhubungan, khususnya yang mengatur wilayah operasional kendaraan, sistem zonasi, serta pengawasan terhadap kendaraan bermuatan besar. Pandangan ini menekankan bahwa kendaraan yang beroperasi dan memanfaatkan infrastruktur disuatu daerah semestinya mematuhi ketentuan administratif dan kewajiban pajak yang berlaku di wilayah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa legitimasi kebijakan publik dimata masyarakat akan semakin kuat apabila kebijakan dipahami selaras dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, sehingga mempermudah terbentuknya penerimaan dan kepatuhan publik. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

“Pemerintah harus memberi penerangan sebelum memungut pajak kendaraan, sehingga masyarakat tahu dan nggak terjadinya simpang siur”.

Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan dan pemungutan pajak, tetapi juga mengedepankan aspek komunikasi dan edukasi publik. Informan menekankan pentingnya pemberian penjelasan yang jelas dan menyeluruh sebelum kebijakan perpajakan diterapkan, khususnya terkait kewajiban pajak kendaraan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang memadai menjadi faktor krusial dalam membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan tujuan serta mekanisme kebijakan secara transparan, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani atau dirugikan secara sepihak. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Ya dari pemerintah seharusnya di cross-check dulu lah baik-baik kan, Masalah ini kan larinya ke ekonomi kan Jadi kalau terlalu cepat mengambil kebijakan Yang rendah ini malah masyarakat bawah ini jadi terdampak ujung-ujungnya”.

Adanya pandangan masyarakat yang menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pertimbangan yang lebih mendalam sebelum menetapkan suatu kebijakan, terutama kebijakan yang berdampak langsung pada aspek ekonomi. Informan menilai bahwa keputusan yang diambil secara terburu-buru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Pandangan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang

kurang melalui kajian komprehensif dapat membebani masyarakat di lapisan bawah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya perumusan kebijakan publik yang berlandaskan analisis dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan ketimpangan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Pemerintah seharusnya ngomong secara gampang agar mudah dipahami masyarakat. Jangan hanya lewat pernyataan singkat di media, supaya masyarakat tidak salah paham.”

Pemerintah perlu menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyampaian informasi yang terbatas pada pernyataan singkat di media dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan salah tafsir. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman publik terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan kesederhanaan pesan yang disampaikan. Dengan demikian, komunikasi pemerintah yang menggunakan bahasa yang lugas dan komunikatif menjadi penting untuk meminimalkan kesalahpahaman serta memastikan pesan kebijakan dapat diterima secara tepat oleh masyarakat.

4.3.4. Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik

Pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan citra pemerintah di tengah masyarakat. Ketika penyampaian kebijakan dilakukan tanpa penjelasan yang komprehensif dan

memicu beragam penafsiran, pemerintah cenderung dipersepsikan kurang tanggap dan tidak komunikatif. Dalam kasus kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB, ketidaksinkronan informasi yang beredar di media menciptakan kesan bahwa pemerintah belum optimal dalam mengelola komunikasi kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa cara masyarakat memaknai kebijakan publik turut memengaruhi penilaian terhadap kredibilitas dan legitimasi pemerintah. Kebijakan yang disampaikan tanpa sosialisasi yang jelas dan konsisten berpotensi menimbulkan sikap skeptis terhadap pemerintah sebagai pengambil keputusan. Sebaliknya, penyampaian kebijakan yang transparan dan responsif dapat memperkuat citra pemerintah sebagai institusi yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak terlepas dari strategi komunikasi yang mampu membangun dan mempertahankan citra positif pemerintah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, menurut anda apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengeluarkan pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Joni menjawab;

“Benarlah. Memang harus begitu. Karena pemerintah daerah bersangkutan mencari pajak dari masyarakatnya yang berusaha, seperti kendaraan itu. Iya. Itu kan secara otomatis kan dampak ekonominya kan berjalan karena mendapatkan pajak dari orang bekerja secara otomatis.”

Informan memandang kebijakan pergantian plat kendaraan sebagai langkah yang sesuai dengan kepentingan fiskal daerah. Kebijakan tersebut dipahami sebagai mekanisme pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari aktivitas usaha masyarakat, khususnya yang menggunakan kendaraan sebagai

sarana operasional. Kendaraan yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dinilai selayaknya turut memberikan kontribusi melalui kewajiban pajak di wilayah tempat aktivitas tersebut berlangsung. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat memaknai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah, dimana peningkatan pendapatan pajak dipersepsikan memiliki implikasi positif terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengeluarkan pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Dedi menjawab;

“Ya sudah la pasti, pemerintah Sumut kan dan Aceh dapat memungut pajak tersebut jika diantara pengguna kendaraan tersebut berdomisili di sumut maupun Aceh”.

Pernyataan ini menggambarkan pandangan bahwa pemerintah daerah, baik Sumatera Utara maupun Aceh, memiliki kewenangan untuk menarik pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan terkait pergantian plat kendaraan dipahami sebagai bagian dari proses pemungutan pajak yang sah oleh pemerintah daerah. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat kebijakan tersebut dari sudut pandang fiskal dan administrasi, bukan sebagai persoalan diskriminatif. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengeluarkan pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Herry menjawab;

“Kalau itu kurang dimengerti ya karna itu udah urusan orang organisasi pemerintahan jadi nggak apa disitu”.

Sikap sebagian masyarakat yang cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan kebijakan kepada pemerintah karena dianggap berada di luar ranah pemahaman mereka. Informan menunjukkan keterbatasan pengetahuan terhadap isi dan mekanisme kebijakan, sehingga memilih untuk menerima keputusan pemerintah tanpa melakukan penilaian lebih lanjut. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam isu kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh persepsi bahwa kebijakan merupakan persoalan teknis yang hanya dapat dipahami oleh aparat pemerintahan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan komunikasi dan edukasi publik agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu bersikap lebih partisipatif dan kritis terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengeluarkan pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB? Informan Lasda menjawab;

“Saya kurang yakin pemerintah sudah mempertimbangkan dampaknya, hal itu pun belum dibahas secara jelas waktu pernyataan itu disampaikan”.

Keraguan terhadap sejauh mana pemerintah telah mempertimbangkan dampak dari kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB secara komprehensif. Kurangnya penjelasan mengenai implikasi kebijakan pada saat pernyataan disampaikan menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut belum didasarkan pada kajian yang mendalam. Pandangan ini mencerminkan bahwa masyarakat menilai pentingnya proses perencanaan dan analisis dampak dalam perumusan kebijakan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak disertai pemaparan konsekuensi yang jelas berpotensi mengurangi tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan dalam menjelaskan pertimbangan dan dampak kebijakan menjadi aspek krusial dalam membangun legitimasi kebijakan di ruang publik. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Joni, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini apakah menurut Anda dirasa adil atau menimbulkan diskriminasi dimasyarakat? Informan Joni menjawab;

“Tidak. Itu kalau misalnya kendaraan itu bertahun misalnya di Aceh, ya wajar orang pemerintah daerah Aceh itu meminta pajak, memungut pajak. Efeknyakan untuk masyarakat juga, untuk rakyatnya bersangkutan begitunya juga sebaliknya”.

Pemungutan pajak dianggap wajar apabila kendaraan digunakan dan berdomisili dalam jangka waktu lama di suatu daerah, karena hasil pajak tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pandangan ini juga menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menarik pajak kendaraan dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pergantian plat kendaraan dinilai lebih dapat diterima ketika dipahami sebagai mekanisme timbal balik antara kewajiban masyarakat dan manfaat yang diperoleh, serta diterapkan secara adil dan setara antarwilayah. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Dedi, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini apakah menurut Anda dirasa adil atau menimbulkan diskriminasi dimasyarakat? Informan Dedi menjawab;

“Menurut saya adil dan tidak menimbulkan diskriminasi untuk masyarakat. Ya, karena kalau dia menetap mengoperasi di wilayah Sumut, ya harus tetap diterapkan seperti itu, kecuali dia cuma hanya melintas, beroperasi, istilahnya kunjungan lah atau yang tidak menetap sifatnya”.

Pandangan bahwa kebijakan pergantian plat kendaraan dinilai adil dan tidak menimbulkan diskriminasi apabila diterapkan berdasarkan status domisili dan aktivitas operasional kendaraan. Kebijakan tersebut dianggap tepat ketika diberlakukan pada kendaraan yang menetap dan beroperasi secara permanen di wilayah Sumatera Utara, sementara kendaraan yang hanya melintas atau bersifat sementara tidak semestinya dikenakan ketentuan yang sama. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam kebijakan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan akan lebih mudah diterima masyarakat apabila dirumuskan secara rasional dan mempertimbangkan perbedaan karakteristik penggunaan kendaraan. Ketika peneliti bertanya kepada informan bapak Herry, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini apakah menurut Anda dirasa adil atau menimbulkan diskriminasi dimasyarakat? Informan Herry menjawab;

“Ya kurang adil, kalau di masyarakat sih yang penting jangan sampai menghambat cari rezeki kan kayak kita nggak supir atau gimana, bawa mobil plat BL sementara bosnya yang nyuruh bawa mobil itu kan ujung-ujungnya kita kan nggak kerja gitu Itulah kalau dari masyarakat”.

Adanya kekhawatiran dari kalangan masyarakat pekerja terhadap implikasi kebijakan pergantian plat kendaraan terhadap aktivitas ekonomi mereka. Kebijakan tersebut dipersepsikan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila penerapannya menghambat proses kerja masyarakat yang menggunakan kendaraan berplat luar daerah sebagai sarana mencari nafkah. Informan menegaskan bahwa dalam banyak kasus, pekerja tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan kendaraan, namun tetap harus menanggung dampak kebijakan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik perlu dirancang dengan

mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pekerja, agar pelaksanaannya tidak mengganggu keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut. Ketika peneliti bertanya kepada informan ibu Lasda, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini apakah menurut Anda dirasa adil atau menimbulkan diskriminasi dimasyarakat? Informan Lasda menjawab;

“Menurut saya, kebijakan ini rasanya gak sepenuhnya adil. Mungkin niatnya baik, tapi kenyataannya ada masyarakat yang merasa diperlakukan berbeda karena plat kendaraannya. Apalagi penjelasannya kurang jelas, wajar kalau muncul rasa diskriminasi”.

Pandangan sebagian masyarakat yang mempertanyakan tingkat keadilan dari kebijakan pergantian plat kendaraan. Walaupun kebijakan tersebut dipersepsikan memiliki maksud yang positif, keterbatasan penjelasan yang disampaikan kepada publik menyebabkan munculnya perasaan diperlakukan tidak setara berdasarkan identitas kendaraan. Situasi ini memicu anggapan adanya unsur diskriminatif di kalangan masyarakat tertentu. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah, dimana ketidakjelasan informasi dapat memunculkan resistensi dan persepsi negatif meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk kepentingan umum.

4.4. Pembahasan

Pembahasan berikut mengaitkan hasil temuan penelitian dengan landasan teori serta kajian pustaka yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena persepsi masyarakat terhadap pernyataan Gubernur Sumut.

4.4.1. Pemahaman Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB belum terbentuk secara menyeluruh dan cenderung terpecah, yang dipengaruhi oleh pola penyampaian informasi dari pemerintah. Sejumlah informan menilai bahwa pernyataan yang disampaikan bersifat singkat dan kurang disertai penjelasan mendalam, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa konteks yang jelas. Ungkapan informan yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut terasa mendadak dan diikuti oleh informasi media yang tidak seragam menunjukkan adanya kelemahan dalam praktik komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan (Arif et al., 2025) yang menegaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah, terutama dari aspek kejelasan pesan, kelengkapan konteks, serta konsistensi informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap bahwa media yang digunakan sebagai sumber informasi turut memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Ketika media sosial menjadi kanal utama tanpa diimbangi dengan klarifikasi resmi dari pemerintah, masyarakat cenderung membangun penafsiran sendiri terhadap informasi yang beredar, yang sering kali berujung pada kesalahpahaman. Pernyataan informan yang menilai bahwa informasi di media sosial kerap dibesar-besarkan menggambarkan dominasi media tersebut sekaligus keterbatasannya dalam menyampaikan pesan kebijakan secara akurat. Seperti yang dikatakan

(Ernungtyas & Boer, 2023) menekankan pentingnya optimalisasi media resmi pemerintah sebagai sarana penyampaian informasi yang terbuka dan kredibel, sehingga masyarakat dapat memahami substansi kebijakan secara lebih utuh dan tidak terpengaruh oleh rumor maupun narasi yang tidak sesuai dengan konteks kebijakan.

4.4.2. Peran Media Massa dan Pembentukan Persepsi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa media massa memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk cara masyarakat memaknai pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB. Sejumlah informan mengungkapkan bahwa pemberitaan media cenderung menekankan sisi kontroversial, sehingga kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai persoalan yang problematis dan layak diperdebatkan. Ketika informasi disajikan tanpa disertai penjelasan resmi yang memadai dari pemerintah, masyarakat cenderung menafsirkan kebijakan tersebut secara negatif, bahkan memahaminya sebagai bentuk pembatasan kendaraan berplat BL. Padahal, kebijakan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penertiban administrasi kendaraan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan (Muklis & Siregar, 2024) yang menyatakan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk cara pandang publik melalui mekanisme agenda-setting dan framing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya ketika kebijakan yang disampaikan bersifat ambigu. Beberapa informan menilai bahwa perbedaan

narasi antara media massa dan media sosial memperbesar ruang kesalahpahaman serta memperlemah citra pemerintah akibat minimnya klarifikasi yang konsisten. Hal yang sama juga dijelaskan oleh (Pranata et al., 2025) bahwa dampak media terhadap persepsi masyarakat sangat bergantung pada keseimbangan dan objektivitas informasi yang disajikan. Pemberitaan yang proporsional dan berimbang cenderung menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan pemberitaan yang sensasional atau tidak utuh berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dijalankan.

Selanjutnya, hasil penelitian mengungkap bahwa media massa berperan sebagai sumber utama informasi kebijakan bagi sebagian besar masyarakat, namun cara media mengemas pesan turut menentukan tingkat pemahaman publik terhadap substansi kebijakan tersebut. Informan yang mengakses informasi dari berbagai platform media, baik media konvensional maupun digital, menunjukkan perbedaan interpretasi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan satu sumber informasi. (Muklis & Siregar, 2024) juga menekankan bahwa media massa memiliki tanggung jawab profesional untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan komprehensif, sehingga masyarakat dapat membentuk persepsi yang tepat. Dengan demikian, peran media massa tidak hanya terbatas pada penyampaian fakta, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam membentuk opini dan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

4.4.3. Komunikasi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dan kejelasan komunikasi kebijakan pemerintah berpengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat terhadap

pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai pergantian plat BL menjadi BK/BB. Beberapa informan menyatakan bahwa penyampaian kebijakan terasa kurang lengkap dan kurang terstruktur, sehingga menimbulkan kebingungan dan beragam interpretasi di kalangan publik. Sebagai contoh, informan mengatakan kebijakan tersebut terkesan “terdengar mendadak” dan tidak dijelaskan secara transparan sehingga masyarakat mudah salah paham. Sejalan dengan (Karimah et al., 2023) dalam komunikasi pemerintah menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik serta meminimalkan kesalahpahaman terhadap kebijakan publik. Komunikasi yang transparan dan akuntabel meningkatkan keterlibatan publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat, terutama ketika kebijakan mengandung dampak sosial ekonomi yang luas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi pemerintah yang responsif dan partisipatif dapat memperbaiki pemahaman publik terhadap substansi kebijakan. Sebagian informan menilai bahwa ketidakjelasan atau keterlambatan klarifikasi resmi membuat masyarakat mengisi kekosongan informasi dengan narasi dari media sosial atau media massa, yang kadang kurang akurat. Pernyataan seperti “seharusnya ada jumpa pers agar tidak hanya penyampaian sepihak” mencerminkan harapan masyarakat terhadap dialog terbuka antara pemerintah dan publik. (Sastrawan & Rahmawati, 2025) juga menegaskan bahwa strategi komunikasi dua arah yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan publik serta memperbaiki pemahaman atas kebijakan. Pemerintah yang mampu menyampaikan penjelasan yang lengkap

dan merespons pertanyaan publik secara cepat cenderung lebih berhasil membentuk pemahaman yang positif, yang pada akhirnya membantu masyarakat memahami tujuan dan latar belakang kebijakan secara menyeluruh.

4.4.4. Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap citra pemerintah sangat dipengaruhi oleh kejelasan penyampaian komunikasi kebijakan. Sejumlah informan menyampaikan bahwa penjelasan yang disampaikan saat pernyataan gubernur dinilai kurang rinci, sehingga menimbulkan kebingungan dan memunculkan anggapan bahwa pemerintah belum menjalankan fungsi komunikasinya secara optimal. Kondisi ini memperkuat pandangan dalam kajian komunikasi pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi dan keteraturan penyampaian informasi publik sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan serta citra positif pemerintah. Menurut (Uly et al., 2023) ketika pesan kebijakan disampaikan secara tidak utuh dan kurang akurat, ruang interpretasi masyarakat menjadi semakin luas, sehingga muncul narasi alternatif yang kerap tidak sejalan dengan maksud kebijakan dan berpotensi menurunkan citra pemerintah di mata publik.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pemerintah merespons dinamika isu di ruang publik turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap citra pemerintah. Beberapa informan menilai bahwa keterlambatan dalam memberikan klarifikasi serta terbatasnya kegiatan sosialisasi menyebabkan masyarakat kesulitan memahami tujuan kebijakan yang disampaikan. Situasi ini sejalan dengan pandangan (Suria Sumantri & Anita Afrilia, 2025) yang

menyebutkan bahwa komunikasi pemerintah yang bersifat proaktif dan dialogis mampu memperkuat legitimasi lembaga publik, sedangkan pola komunikasi yang cenderung pasif atau reaktif justru dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang berjalan secara efektif memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa diperhatikan, sehingga berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Di samping itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa cara media membingkai pemberitaan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap citra pemerintah. Beberapa informan menyebutkan bahwa pemberitaan media lebih menonjolkan sisi kontroversial, sehingga kebijakan yang bersifat administratif dipahami sebagai tindakan yang berpotensi diskriminatif. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kehumasan pemerintah dalam mengelola informasi publik secara akurat, terbuka, dan sesuai konteks, sebagaimana dijelaskan (Amalia & Heriyanto, 2025) yang memandang humas sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Ketepatan humas dalam menyampaikan latar belakang dan tujuan kebijakan akan membantu membentuk persepsi publik yang lebih proporsional dan memperkuat citra pemerintah di tengah dinamika opini masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat Kota Medan terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara mengenai kebijakan pergantian plat kendaraan BL menjadi BK/BB, dengan menitikberatkan pada aspek pemahaman masyarakat, peran media massa, serta efektivitas komunikasi pemerintah dalam membentuk persepsi publik. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan penelusuran informasi media, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbentuk secara beragam. Perbedaan persepsi ini berkontribusi oleh kejelasan pesan kebijakan, intensitas paparan media, serta cara pemerintah menyampaikan dan menjelaskan kebijakan kepada publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan informasi yang utuh dan konsisten berkontribusi terhadap munculnya interpretasi yang berbeda di tengah masyarakat, baik yang bersifat menerima maupun kritis. Proses temuan ini terbagi menjadi 4 indikator yaitu;

1. **Pemahaman Masyarakat:** Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian masyarakat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai langkah administratif yang bertujuan untuk menertibkan kendaraan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya bagi kendaraan yang beroperasi secara menetap di wilayah Sumatera Utara. Namun, di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang memaknai kebijakan tersebut sebagai

bentuk larangan kendaraan berplat BL memasuki wilayah Sumut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman publik sangat bergantung pada kelengkapan dan kejelasan informasi yang diterima.

2. **Peran Media Massa dan Media Sosial:** Media massa dan media sosial memiliki kontribusi yang besar dalam proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pemberitaan yang menonjolkan sisi kontroversial, perbedaan sudut pandang antar media, serta penyebaran informasi yang cepat dan viral di media sosial turut memperkuat munculnya kesalahpahaman publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam membingkai realitas kebijakan, sehingga turut menentukan arah opini dan persepsi masyarakat.
3. **Komunikasi Pemerintah:** Strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dinilai belum sepenuhnya efektif oleh sebagian masyarakat. Penyampaian pernyataan yang relatif singkat, minimnya sosialisasi awal, serta keterbatasan klarifikasi resmi menyebabkan kebijakan dipersepsikan sebagai keputusan yang bersifat mendadak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pola komunikasi yang lebih terbuka, terstruktur, dan mudah dipahami agar kebijakan publik tidak menimbulkan kebingungan maupun penafsiran yang keliru.
4. **Citra Pemerintah dan Kebijakan Publik:** Citra pemerintah dalam konteks kebijakan ini terbentuk secara dualistik. Di satu sisi, kebijakan dipersepsikan wajar dan adil apabila diterapkan kepada kendaraan yang beroperasi dan memperoleh manfaat ekonomi di wilayah Sumatera Utara.

Namun, di sisi lain, lemahnya komunikasi kebijakan menimbulkan persepsi negatif yang berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun citra melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Utara merupakan hasil dari interaksi antara pesan kebijakan, pemberitaan media massa, dinamika media sosial, dan strategi komunikasi pemerintah. Ketidakselarasan antara informasi resmi pemerintah dan narasi yang berkembang di media berkontribusi terhadap beragamnya penafsiran masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi pemerintah yang transparan, konsisten, dan partisipatif agar kebijakan publik dapat dipahami secara tepat dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi pemerintah, peran media, dan pembentukan persepsi publik. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif, sehingga kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk memperkuat strategi komunikasi kebijakan dengan menyampaikan informasi secara sistematis, jelas, dan berkesinambungan sebelum kebijakan disampaikan kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang terbuka dan disertai penjelasan menyeluruh mengenai substansi kebijakan serta landasan hukum yang mendasarinya diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan mendorong terbentuknya pemahaman publik yang lebih utuh terhadap kebijakan pemerintah.
2. Bagi Media Massa dan Pengelola Media Digital: Media massa dan pengelola platform digital diharapkan mampu mengedepankan prinsip pemberitaan yang objektif, akurat, dan proporsional dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik. Konsistensi antara judul dan isi berita, serta penghindaran penggunaan narasi yang bersifat sensasional, perlu diperhatikan agar media dapat menjalankan fungsi informatif dan edukatif secara maksimal dalam membentuk persepsi masyarakat yang seimbang dan berbasis fakta.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti analisis framing media atau perbandingan kebijakan di beberapa daerah, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik komunikasi kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran aktor

komunikasi lain, seperti unit humas pemerintah maupun figur yang berkontribusi di media digital, dalam meningkatkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A., & Priadi, R. (2017). *PERSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP SOSIALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN*.
- Ainani, M., Tazkia, N., & Hamdie, A. (2025). *Analisis Komparatif Framing Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan I***. <https://mediaindonesia.com/polit>
- Ainul Yaqin, A. M. (2023). *Volume 1 Nomor 2 Desember 2023 Analisis Framing Media Indonesia.com dan Detik.com Dalam Isu Endorse Jokowi Pada Prabowo Subianto*. <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/63f863137a68c/profil-surya-paloh-ketua-partai-nasdem->
- Amalia, A., & Heriyanto, Y. (2025a). Strategi Public Relations dalam Membangun Citra Pemerintah: Studi Kasus BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas. In *Journal Media Public Relations* (Vol. 5, Issue 1).
- Amalia, A., & Heriyanto, Y. (2025b). Strategi Public Relations dalam Membangun Citra Pemerintah: Studi Kasus BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas. In *Journal Media Public Relations* (Vol. 5, Issue 1).
- Anshori, A. (2018). *Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018*. <https://doi.org/10.30596/ji.v2i2.2091>
- Arif, R. N., Syahrir, R., Ip, S., & Si, M. (2025). *THE TRANSFORMATION OF POLICY COMMUNICATION THROUGH SOCIAL MEDIA: A THEORETICAL APPROACH TO DIGITAL GOVERNANCE*.
- Camellia, S., & Putra, R. J. (2023). Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(07), 357–364. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i07.005>
- Cangara, H. (2019). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Ed. 4.: cet 19). Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2019). *RESEARCH DESIGN : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Ed.4). Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2017). *ILMU KOMUNIKASI : Teori dan Praktek* (Cet. 28). PT. Remaja Rosdakarya.
- Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2023). The Citizen Trust and Engagement in Indonesia Government's Social Media and Website. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 16(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v16i1.2159>
- Hidayat, T. (2019). Komunikasi Politik Etnis Tionghoa dalam Mengungkap Identitas Relasi Sosial dan Politik (Studi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan). *Persepsi: Communication Journal*, 2(1), 70–78. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v2i1.3936>
- Karimah, K., Syahirah Kamila, L., Pramudhita, I., & Purwanto, E. (2023). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PENGARUH KOMUNIKASI*

PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.

- Karunia Isa, N., & Lina Sinatra Wijaya, dan. (2024). Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Positif Pemerintah Kota Surakarta Melalui Media Relation | 85. In *Journal Media Public Relations* (Vol. 4, Issue 2).
- Lubis, F. H. (2022), Hidayat, F. P., Ananda, F. R., & Anfasa, I. (2022). The Impact of Social Media Use on Adolescents. *Proceedings of the International Conference on Communication, Policy and Social Science (InCChuSi 2022)*, 682. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_22
- Matthew B. Miles, A. M. H. J. S. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Vol. XIV* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muklis, M., & Siregar, M. (2024). PERAN MEDIA MASSA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4159>
- Mukmin, M. N., Zuwariah, S., & Kusuma, I. C. (2020). TAX COMPLIANCE: SANCTION AND AWARENESS PERSPECTIVE OF MOTOR AND CAR OWNERS IN INDONESIA. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 2(2), 156–163. <https://doi.org/10.30997/ijsr.v2i2.55>
- Pramiyanti, A., Mayangsari, I. D., Nuraeni, R., & Firdaus, Y. D. (2020). Public perception on transparency and trust in government information released during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 351–376. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2020.8.3.351>
- Pranata, S., Hindu, I. K., Negeri, H., Bagus, G., & Denpasar, S. (2025). *Dampak Pemberitaan Media Massa pada Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah.*
- Ritonga, B. A. A., Simanjorang, E. F. S., & Siregar, M. (2023). Public Perception of the Quality of Motor Vehicle Tax Payment Services. *Almana : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 311–318. <https://doi.org/10.36555/almana.v7i2.2164>
- Sastrawan, A., & Rahmawati, D. E. (2025). Building Public Trust Through Government Communication Strategies: A Case Study Of Tapera Policies In Indonesia. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 9(2), 249–264. <https://doi.org/10.33373/jtp.v9i2.8098>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cetakan 1). Alfabeta.
- Suria Sumantri, A., & Anita Afrilia, U. (2025). *PENYELENGGARAAN KEHUMASAN PEMERINTAH DALAM MENGHADIRKAN STRATEGI PENYAMPAIAN INFORMASI TENTANG CORE VALUES AND EMPLOYER BRANDING.* 8, 1–13. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61326>

- Uly, C., Pandiangan, A., & Ratnasari, E. (2023). HUMAS PEMERINTAH DAN TRANSPARANSI INFORMASI UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK. *Desember*, 7(2), 155–168.
- Vera Nurfajriani, W. I. M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila memilih guru itu agar dapat diandalkan
nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjaringan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DBAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan, umsmedan, umsumedan, umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

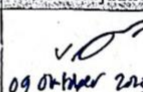
Medan, 07 Oktober 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : RAHMAD ABDILLAH HAN
NPM : 2203110368
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,70.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Persepsi masyarakat kota medan atas pernyataan gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi Bk/BB	 09 Oktober 2025
2	Pelbandingan Strategi pemasaran digital bolu Mananti & Zubirke melalui media sosial dalam membangun image di kota medan	
3	Strategi komunikasi dakwah komunitas muslim mualaf etnis tamil dalam bersosialisasi di kota medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas deban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

010.22.311

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 09 Oktober 2025

Ketua,

(Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 6127048401

Pemohon,



(.....)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:.....

(Sigit Hardiyanto...)
NIDN: 6112118802





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

SK-Z

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
 Nomor : 1789/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 09 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: RAHMAD ABDILLAH HAQ
N P M	: 2203110368
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN ATAS PERNYATAAN GUBERNUR SUMUT TENTANG PERGANTIAN PLAT BL MENJADI BK/ BB

Pembimbing : Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.LKom.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 010.22.311 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 18 Rabiul Akhir 1447 H
 10 Oktober 2025 M

Dekan,

 Assoc. Prof. Dr. KHIFAN SALEH, MSP.
 NIDN 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dairi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> ✉ fslp@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id 📱 [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) 📺 [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) 📺 [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) 📺 [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 10 November 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RAHMAD ABDULWAH HAQ
 NPM : 2203110360
 Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1789./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025.. tanggal 09 Oktober 2025 dengan judul sebagai berikut :

Perspektif Masyarakat Kota Medan atas Pernyataan Gubernur
 Sumut tentang Pergantian plat BL menjadi BK/BB.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

Menyetujui
 Pembimbing

Pemohon,

(Dr. Akhyar Anshari, S.S., M.Pd.) (Dr. Sihit Hardiyanto, S.Sg.) (RAHMAD ABDULWAH HAQ)

NIDN: 0127048401

NIDN: 0112118802



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2119/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Rabu, 03 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU LT. 2
Penyimpin Seminar : Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

SK.4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	WINDI SAHPUTRI RAMKUTI	2203110122	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI DALAM BERINTERAKSI SOSIAL SISWA AUTIS DENGAN SISWA NORMAL DI SMA SWASTA ERIA MEDAN
2	RAHMAD ABDILLAH HQ	2203110368	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	PERSPEKSI MASYARAKAT KOTA MEDAN ATAS PERHATIAN GUBERNUR SUMUT TENTANG PENGANTIAN PLAT BL. AMENDUD BK/BB
3	KESYA ASTRA OLWA	2203110270	MURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	MAKNA MERCEKOK PADA PEREMPUAN BERTUBUH DI RUANG PUBLIK DALAM STIGMA SOSIAL MASYARAKAT KOTA MEDAN
4	REJENI ANJANI HARAHAP	2203110275	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	DAMPAK TEORI INOKULASI TENTANG KEPUTUSAN GEN Z MELAKSANAKAN IBADAH UMROH MELALUI PT. GHANIA HAMMADI HARAHAP
5	MARISA HASANAH NAULU TOBING	2203110332	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	Asoc. Prof. Dr. ASRAR ADIYANI, M.I.Kom.	PENANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH KLINIK ALEXANDRA RANTAU PRAPAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HIGIEN SEHAT

Medan, 02 Desember 2025

22 November 2025





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita mejawab tuntas ini agar diistikan
nomor dan lah 220194

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK/KP/PTIK/2020
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6022409 • 66224567 Fax. (061) 6625474 • 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Slk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap

RAHMAD ARDIYAH HAQ

N P M

2203110360

Program Studi

Ilmu Komunikasi

Judul Tugas Akhir Mahasiswa
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

Persepsi masyarakat kota medan atas pernyataan
gubernur sumut tentang pengantian plat BL menjadi
BK/BK

No	Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07-10-2025	ACC Judul	
2.	09-10-2025	Tanda tangan Penetapan dosen Pembimbing	
3.	20-10-2025	Bimbingan proposal tugas akhir I	
4.	24-10-2025	Bimbingan proposal tugas akhir II dan III	
5.	07-11-2025	Bimbingan daftar pustaka	
6.	10-11-2025	ACC proposal tugas akhir	
7.	10-11-2025	Tanda tangan sk-5 permohonan seminar proposal tugas akhir	
8.	12-12-2025	Bimbingan revisi proposal tugas akhir Bab I, II, III	
9.	13-12-2025	Bimbingan draft wawancara & acc draft wawancara	
10.	4-1-2026	bimbingan bab 4 & bab 5 tugas	
11.	29-1-2026	akhir acc tugas akhir & penantangan sk-5	

Medan, 2... Februari.....2026...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Assoc. Prof. Dr. A. F. Z. Saleh, M.S.P.
NIDN: 0010017402

Dr. Ahmad Anshori, S.Sos, M. Ekorn
NIDN: 0127048401

Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M. E. ko
NIDN: 0112118862



Dipindai dengan CamScanner



Acc draft Pedoman wawancara
12/12 2025
Sigat Hardiyanto

Daftar Wawancara

Nama : Rahmad Abdillah Haq

Npm : 2203110368

Judul penelitian : Persepsi masyarakat kota medan atas pernyataan gubernur sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB

A. Data Diri Singkat Narasumber

1. Nama:
2. Usia:
3. Pekerjaan:
4. Pendidikan Terakhir:
5. Domisili:

B. Pertanyaan Inti Wawancara (Terstruktur)

1. Pemahaman masyarakat

1. Bagaimana anda mengetahui pernyataan Gubernur terkait pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB?
2. Bagaimana penilaian anda tentang pernyataan gubernur Sumut tentang pergantian plat BL menjadi BK/BB?

2. Peran media massa dan pembentukan Persepsi

3. Bagaimana anda melihat pemberitaan media terkait pernyataan gubernur sumut yang melarang plat BL memasuki Sumut?
4. Dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang pernyataan pergantian plat BL yang memasuki wilayah Sumut menjadi BK/BB?
5. Apakah Anda merasa media sosial memperbesar pro dan kontra mengenai pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB?

3. Komunikasi Pemerintah

6. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan pergantian plat BL menjadi BK/BB?

4. Citra Pemerintah dan kebijakan publik

1. Menurut Anda, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengeluarkan pernyataan pergantian plat BL menjadi BK/BB ?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan ini, apakah menurut Anda dirasa adil atau menimbulkan diskriminasi di masyarakat?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 12712021000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

Bila menulis surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00186/KET/II.1-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Rahmad Abdillah Haq
 NPM : 2203110368
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Komunikasi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Sya'ban 1447 H
 23 Januari 2026 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 1247/KET/KESKAP/I/2026

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rahmad Abdillah Haq
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Persepsi Masyarakat Kota Medan Atas Pernyataan Gubernur Sumut Tentang Pergantian Plat BL Menjadi BK/BB
Jumlah Halaman : 8 Halaman
Penulis : Rahmad Abdillah Haq

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Januari 2026

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 286/UND/13.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
 Pembukaan : 13.00 WIB



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	AUDIVA THANIA	2203110076	13.30 WIB	Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	POLA KOMUNIKASI IBU DAN ANAK MELALUI MODEL PERTUKARAN SOSIAL DALAM MENCEGAH KENAKALAN REMAJA DI MEDAN MARELAN
2	RAHMAD ABDILLAH HAQ	2203110368	14.00 WIB	Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN ATAS PERNYATAAN GUBERNUR SUMUT TENTANG PERGANTIAN PLAT BL AMENADI BKU
3	SULTAN MAULANA	2103110178	13.30 WIB	Asoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	Asoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH KOMUNITAS LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PANTAI CEMARA LINGGA KUTA KABUPATEN BIREUEN
4	MUHAMMAD RAMADHANSAH HASIBUAN	2103110237	14.00 WIB	Asoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	Asoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINJAI BARAT DALAM PROGRAM BIMBINGAN PRAKTIK
5	AMAR SIDIQ DERMAWAN GULO	2103110245	13.30 WIB	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Asoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	KOMUNIKASI PERSUASIF POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM MENANGANI KENAKALAN REMAJA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1. Ditandatangani oleh :

Prof. Dr. MOHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.
 Rektor

Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Medan, 21 Syaaban 1447 H
 09 Februari 2026 M

Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	: Rahmad Abdillah Haq
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang/ 29 April 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Bida Asri 1
Email	: rahmadabdillahhaq@gmail.com

Nama Orang Tua

Nama Ibu	: Aflina Suryanita Lbs
Nama Ayah	: Abdul Karim
Alamat	: Bida Asri 1

Pendidikan Formal

2007-2013	: SD Medan Putri
2013-2016	: SMP Restu Bunda Batam
2016-2019	: SMK Negeri 10 Medan